

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Tidak diragukan lagi bahwa perubahan dan kemajuan yang ada di dunia tentunya berhubungan dengan suatu hal yang baru. Berbagai bentuk perubahan ini maka akan meningkatnya persaingan global yang akan menuntut organisasi untuk mampu lebih maju di dalam menghadapi persaingan global tersebut. Teknologi serta inovasi dalam era globalisasi merupakan suatu kunci yang mampu meningkatkan kualitas pada peradaban bangsa. Pemerintahan negara atau kota dan daerah akan selalu menghadapi persaingan global atau persaingan kota dan daerah, sehingga kemampuan pengelolaan organisasi mereka bisa menjadi pertarungan kredibilitas.

Berhubungan dengan perubahan yang dijelaskan diatas, maka kini organisasi harus mampu melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungannya. Adaptasi tersebut dilakukan agar organisasi tersebut mampu mencapai tujuannya serta tetap bisa bersaing dengan baik sesuai dengan perkembangan zaman.

Indonesia sudah memasuki era revolusi industri 4.0 yang membuat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi semakin pesat. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan revolusi digital. Ditandai dengan adanya *Mobile Internet*, sensor yang lebih kecil dan cepat serta murah, *artificial intelligence*, dan *machine learning*. Pada era ini salah satu inovasi utamanya adalah adanya pemanfaatan *Internet of Thing (IoT)* berbasis *Artificial Intelligence* (kecerdasan buatan), *Drone Operation Centrel*, *Big Data*, hingga rencana pengembangan

*Virtual Workers*. Revolusi industri 4.0 tidak hanya berpotensi luar biasa dalam merombak industri, tetapi juga mengubah berbagai aspek kehidupan manusia.

Bagi birokrasi pemerintahan, yang seiring perkembangan zaman, harus mampu bertransformasi dan selalu berubah ke arah yang lebih baik. Transformasi pada birokrasi pemerintahan dipandang sebagai suatu kewajiban untuk diterapkan, dalam berbagai skala ruang lingkup, dan kompleksitasnya. Dengan demikian kini Indonesia sudah mulai memasukkan gerakan ini sebagai agenda nasional sebagai cara untuk mampu meningkatkan daya saing ke kancah pasar global. Aparatur sipil negara (ASN) di tuntun untuk mampu adaptif dengan perkembangan teknologi dan informasi secara positif, hal ini guna untuk menciptakan mutu pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan efisien. Perkembangan Revolusi industri 4.0 membawa dampak besar bagi perkembangan dan kemajuan perekonomian dan peradapan sehingga perlu strategi untuk memaksiamalkannya di berbagai aspek.

Berkaitan dengan yang sudah di jelaskan di atas dapat di artikan bahwa adanya kemajuan teknologi dan informasi serta potensi pemanfaatnya secara luas, mampu membuka peluang bagi penggunaan teknologi dan informasi secara cepat dan akurat. Untuk itu pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pemerintahan (*e-Government*) di harapkan mampu meningkatkan efisiensi, efektifitas serta transparansi dan akuntabel penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Untuk itu dengan adanya kebijakan dan strategi pengembangan *e-Government* ini maka pemerintah yang di harapkan adalah pemerintah yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi

informasi untuk mengurangi sekat-sekat organisasi birokrasi, seperti menyederhanakan proses pelayanan, lebih terdapatnya transparansi dan akuntabel pada pelayanan publik.

Kota Tanjungpinang merupakan salah satu kota yang sedang melakukan perkembangan secara terus menerus, salah satu perkembangan yang sedang dilakukan adalah untuk menjadikan Kota Tanjungpinang menjadi Kota yang maju, yaitu kota yang dapat menjamin perikehidupan warganya secara layak dan bermartabat dan dapat menginspirasi kebanggaan warganya melalui pemerintahan yang baik dan bersih, kepemimpinan yang mengayomi, birokrasi yang responsif dan melayani, serta pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada stabilitas ekonomi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan keunggulan Kawasan. Hal ini serupa dengan Visi dari walikota dan wakil walikota Tanjungpinang tahun 2018-2023, selain itu di terdapat pula salah satu Misi walikota dan wakil wali kota yang tertulis di RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung aparatur yang berintegritas dan kompeten”. Adapun berdasarkan misi tersebut di bentuklah suatu sasaran yang ingin dicapai salah satunya yaitu meningkatkan penerapan *e-Government*. Sesuai dengan Visi dan Misi yang sudah dipaparkan maka dapat di simpulkan bahwa penerapan pengembangan *e-Government* di lingkungan pemerintahan kota Tanjungpinang adalah salah satu aspek yang sedang pemerintah kota Tanjungpinang jadikan sasaran di dalam mewujudkan Visi dan Misi dari Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang

2018-2023, sehingga pengembangan *e-Government* sudah sangatlah penting untuk di perhatikan lebih lanjut.

*e-Government* adalah singkatan dari *Electronic Government*. *e-Government* adalah suatu perubahan penyelenggaraan pemerintah dari yang bersifat kaku dan pelayanan yang panjang menjadi bersifat teknologi dan informasi. Sehingga dengan adanya hal ini di harapkan kualitas penyelenggaraan pemerintah untuk kedepannya lebih efektif dan efisien. Perubahan penyelenggaraan pemerintah yang konvensional menjadi penyelenggaraan pemerintah yang berbasis teknologi dan informasi juga merupakan salah satu dari usaha di dalam reformasi birokrasi sehingga di dalam hal ini artinya *e-Government* bukan hanya semata mata merubah penyelenggaraan pemerintah menjadi penyelenggaraan pemerintah yang berbasis TIK saja, melainkan terdapat suatu yang diharapkan dari munculnya pemanfaatan TIK tersebut untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, meningkatnya pelayanan publik serta meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dari penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu sejalan dengan pengertian *e-Government* yang di rumuskan oleh Bank Dunia yaitu *e-Government* adalah sesuatu yang bertanggung jawab dengan menggunakan TIK oleh pemerintahan dalam menjalankan birokrasi pemerintahan untuk merubah pola hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat, sektor swasta atau Lembaga pemerintahan lainnya guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas serta efisiensi penyelenggaran pemerintahan. *e-Government* digunakan oleh pemerintah dalam urusan administrasi, pelayanan serta

pengendalian sumber daya milik organisasi yang kemudian diawasi dan dikendalikan oleh organisasi yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian. Untuk itu Dinas Komunikasi dan Informasi di dalam penerapan peningkatan *e-Government* mendapatkan peranan yang penting yaitu sebagai roda penggerak penerapan *e-Government* di kota Tanjungpinang. Hal ini juga sejalan dengan yang tertulis di RPJMD 2018-2023 Kota Tanjungpinang di mana yang menjadi perangkat daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab pada sasaran meningkatkan *e-Government* adalah Dinas Komunikasi dan Informatika kota Tanjungpinang.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti menemukan bahwa lingkungan pemerintahan kota Tanjungpinang sudah banyak melakukan pembuatan beberapa inovasi-inovasi aplikasi ataupun web-web yang digunakan untuk kegiatan internal pemerintahan ataupun pelayanan publik. Hal ini dapat di lihat melalui data aplikasi atau web yang ada di kota Tanjungpinang. Berikut peneliti paparkan data rekapan sistem informasi internal Pemerintah Kota Tanjungpinang sejak tahun 2018 yang peneliti dapatkan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.

**Tabel 1. 1 Rekap Sistem Informasi Internal Pemerintahan Kota Tanjungpinang**

No	Unit Kerja	Nama Sistem Informasi
1.	Inspektorat Daerah	e-sakip
2.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Online Single Submission (OSS)
		Apekeje
		SIMPEG
3.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	PPDB Online
		e-BPHTB
4.	Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah	SIMRS
		e-Registrasi dan Bridging BPJS
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sikancil
6.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	e-Puskesmas
7.	Dinas Pendidikan	SIPBOS
		SIPDPD
8.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Gerai Tani'e
9.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Website MPP
		Website Support MPP
		Website DPMPTSP
10.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro	Ak-1 Online★
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Website Portal Pemko
		Opendata
		Kliping Digital
		Tanjak
		Pindai
12.	Kec. Bukit Bestari	Template OPD
		SIMARTA

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

Pelaksanaan *e-Government* di kota Tanjungpinang tentu tidak semudah membalikan telapak tangan, di dalam penerapannya masih terdapat kekurangan dan kelebihan hal ini dapat di lihat dari penilaian mandiri indeks SPBE kota Tanjungpinang pada tahun 2019, dimana menetapkan target dengan skor 2,05 sedangkan yang terealisasi memiliki skor 2,04 yang artinya capaian kinerja pada Indeks SPBE mencapai 99,5% dengan predikat “cukup”. Meskipun sudah

mencapai predikat “cukup” namun masih terdapat kendala-kendala di dalam mencapai target yang di inginkan Adapun salah satu penyebab nya sebab terbatasnya kompetensi petugas dan pemerintahan kota Tanjungpinang serta belum memiliki sistem monitorin dalam pemantauan efektifitas pemanfaatan aplikasi pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Hal ini terbukti jika di lihat dari progress report pendataan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Kota Tanjungpinang sebagai berikut

**Tabel 1. 2 Progres Pendataan SPBE Tahun 2022 Pemerintahan Kota Tanjungpinang**

<b>Jumlah Unit Kerja</b>	<b>Sudah melakukan penginputan</b>	<b>Belum melakukan penginputan</b>
59	26 Unit kerja (44%)	33 Unit kerjra (56%)
<b>Jumlah unit kerja yang tidak memiliki Sistem Informasi</b>		<b>11 Unit Kerja</b>

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika (2022)*

Pada tabel di atas dapat kita ketahui bersama masih banyak OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) di kota Tanjungpinang masih memiliki rasa kesadaran yang kurang untuk selalu berusaha meng-*upgrade* adanya inovasi aplikasi ataupun web yang telah di bentuk, sehingga banyak sekali aplikasi atau web pelayanan publik atau pelayanan internal organisasi yang tidak memiliki perkembangannya dengan baik seperti terjadi nya salah server atau bahkan aplikasi atau web tersebut hanya sekedar di buat tanpa kejelasan perkembangan pemanfaatannya, padahal jelas tertera di dalam RPJMD 2018-2023 kota Tanjungpinang yang menjadi fokus sasaran pada tahun 2022 adalah perkembangan



*e-Government* akan tetapi hingga kini perkembangan tersebut belum terlihat dengan maksimal.

Hal serupa juga di rasakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika kota Tanjungpinang, dimana dinas ini didalam menjalankan tugasnya sebagai roda penggerak pengembangan *e-Government* di kota Tanjungpinang juga merasakan beberapa faktor pendorong dan penghambat di dalamnya baik internal maupun ekterenal. Adapun salah satu faktor penghambat di dalam pelaksanaan *e-Government* di kota Tanjungpinang adalah seperti (1) Belum adanya sistem elektronik yang terintegrasi dalam menerapkan *e-Government* (2) Belum adanya pengelolaan website Pemerintah Kota secara terintegrasi (3) Penyebaran informasi kepada masyarakat yang transparan dan akuntabel belum terlaksana (4) Adanya kesenjangan kemampuan TIK Masyarakat (5) Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten di daalam teknologi, komunikasi, dan informatika (6) Belum memadai insfrastruktut *e-Government*.

Berdasarkan dari pemaparan tersebut maka di butuhkan strategi yang tepat oleh Dinas Komunikasi dan Infromasi untuk mengatasi kekurangan dan kelebihan yang ada pada lingkungan pemerintahan kota Tanjungpinang dalam mengembangkan *e-Government*. Strategi ini adalah suatu hal yang membantu dan memudahkan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mampu mengembangkan pelaksanaan *e-Government* di lingkungan kota Tanjungpinang, sebab hal ini merupakan fokus dari sasaran RPJMD 2018-2023 kota Tanjungpinang di tahun 2022.



Untuk itu dengan melakukan penelitian ini peneliti memfokuskan bagaimana Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika di dalam mengembangkan hal-hal yang sudah berjalan dengan baik di tahun tahun sebelumnya serta mengatasi berbagai kendala-kendala yang ada di dalam mengembangkan *e-Government* di lingkungan pemerintahan Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah diuraikan tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait strategi pengembangan *e-Government* oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, penelitian ini dimaksud untuk mengetahui strategi apa yang telah dibentuk oleh Dinas Komunikasi dan Informatika di dalam mengembangkan *e-Government* dengan judul “Strategi Pengembangan *e-Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan maka, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, bagaimana **Strategi Pengembangan *e-Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang?**

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai strategi pengembangan *e-Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika kota Tanjungpinang.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu :

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini merupakan salah satu bahan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Administrasi Negara khususnya serta memberikan referensi bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian sejenis

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, khususnya untuk seluruh SDM di lingkungan Internal maupun Eksternal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang untuk menjadikan rekomendasi dan pertimbangan di dalam usaha mengembangkan *e-government* di lingkungan pemerintahan kota tanjungpinang.

